

## **STUDI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MUARA JAWA ULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Rian Pranata<sup>1</sup>, Erwin Resmawan<sup>2</sup>, Budiman<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian Skripsi Ini dilakukan berlokasi di Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara . Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus dalam penelitian terdiri dari Menampung dan penyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembagunan, Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh persatuan negara kesatuan republik indonesia, mengerakan swadaya gotong royong masyarakat dan menggali,pendayagunaan dan pembagunan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup dan faktor-faktor penghambat dan pendukung Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara.*

*Hasil penelitian bahwa Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan baik. Dari hasil penelitian dari indikator dapat dilihat, dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat mewujudkan mekanisme partisipasi masyarakat dengan menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah, serta mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan melaksanakan dan mengendalikan pembagunan serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu berkerja sama dengan Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat sehingga dapat mewujudkan percepatan pembagunan di kelurahan Muara Jawa Ulu.*

***Kata Kunci*** : Tugas, fungsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rianpranata16@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Pembangunan nasional adalah di rumuskan sebagai suatu proses guna menciptakan berbagai perubahan yang berjalan dengan cepat dari arah yang baik kearah yang lebih baik maupun perubahan-perubahan yang membawa berbagai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional yang di maksud yaitu pembangunan yang menyeluruh baik di bidang politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan termasuk di dalamnya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai mana telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang bunyinya yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pembangunan masyarakat pedesaan maupun kelurahan harus mendapat perhatian besar dari pemerintah, karena desa atau kelurahan merupakan tulang punggung negara, juga merupakan basis sosial budaya dan basis pertahanan, mengingat sebagian besar dari masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa dan kelurahan. dengan ini pembangunan adalah usaha untuk melaksanakan perubahan atau pembangunan adalah usaha untuk melaksanakan dengan menggunakan potensi-potensi yang ada untuk tujuan yang di inginkan kearah yang lebih baik untuk menunjang pembangunan nasional

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitas dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu persyaratan utama Serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga tertuang di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan " Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan otonomi daerah memiliki hubungan resiprokal atau hubungan timbal.

Bahwa Pelaksanaan Tugas dan fungsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat penting sebagai wadah Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, Penyusunan rencana, pelaksana, pelestari dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, Menumbuhkembangkan, dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dan, Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup .

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara*”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pelaksanaan***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi adalah bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Nurdin Usman. (2002:70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Selanjutnya Menurut Abdul Wahab (2001: 65), Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Harsono (2002:67), mengungkapkan pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

### ***Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat***

Sesuai dengan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut keputusan presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain yang di sebut Lembaga Pemberdaya masyarakat adalah Lembaga masyarakat di kelurahan yang di bentuk

dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan Prakarsa Serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat yang meliputi aspek-aspek ekonomi, social, budaya, dan keterlibatan keamanan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan setempat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui LPM ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan, selain itu, LPM bertugas pada untuk menggerakkan swadaya masyarakat secara bergotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan., dalam hal ini dimaksud sebagai kemampuan masyarakat untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2012 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang disingkat LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong goyong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dan Pasal 13 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

1. Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
2. Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestari dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuh kembangkan, dan penggerak rakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dan
6. Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu organisasi yang merupakan mitra kerja kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk menampung, memproses, dan

merencanakan segala bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

### ***Masyarakat***

Masyarakat merupakan suatu objek kelompok lemah tidak berdaya yang perlu mendapatkan suatu perhatian untuk membentuk suatu masyarakat yang berdaya yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk dapat melakukan suatu perubahan bagi diri mereka sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar.

Dalam bukunya Edi Suharto (2005:47-48) mengemukakan bahwa tujuan mempelajari masyarakat adalah agar dapat melakukan penelitian mengenai masyarakat sehingga mampu memahami konteks dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan, mengevaluasi sistem pelayanan kemanusiaan yang ada dan mengerti struktur pengambilan keputusan di wilayah yang ada tersebut. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama.

Ada beberapa fungsi masyarakat yaitu sebagai penyedia dan distribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol social dan organisasi politik. Ada beberapa aspek dalam mempelajari masyarakat diantaranya adalah :

1. Nama dan batas wilayah.
2. Demografi : jumlah penduduk, distribusi usia, kelompok minoritas, jumlah anggota keluarga, status keluarga.
3. Sejarah wilayah : kapan, mengapa dan kejadian penting mengenai perkembangan wilayah, perubahan karakteristik penduduk, alasan kedatangan kepergian penduduk.
4. Geografi dan pengaruh lingkungan terhadap masyarakat.
5. Kepercayaan dan sikap.
6. Politik lokal, kekuasaan dan pengaruh.
7. Ekonomi dan bisnis lokal.
8. Distribusi pendapatan.
9. Fasilitas dan program-program pendidikan.
10. Sistem kesehatan dan kesejahteraan.
11. Masalah utama dan perhatian masyarakat.

Dari definisi diatas maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu, yang hidup bersama dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam waktu yang lama. Jika dilihat fungsi dan tujuan mempelajari masyarakat, maka masyarakat adalah sebuah kelompok individu-individu yang membutuhkan sebuah perhatian sehingga tumbuh kesadaran dan kepercayaan di dalam diri mereka bahwa mereka sebenarnya mempunyai kemampuan dan kualitas hidup.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Sulistiani (2004:77) secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan, dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak mempunyai daya atau belum berdaya.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:129) Mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya sadar berkesinambungan jangka panjang, dengan melibatkan semua potensi bangsa, membutuhkan kesungguhan, pengorbanan, kearifan, kejujuran juga keberanian yang penuh damai”.

Menurut Sumaryadi (2005:111) pada dasar pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya berpola dari pemikiran pemerintah atas pembangunan itu sendiri. Alhasil pembangunan bermakna pemaksaan kehendak pemerintah kepada masyarakat. Akibatnya pembangunan menjadi bias dari tujuan awalnya. Bahkan disaat lalu muncul ledakan dimana ada pembangunan disitu ada penggusuran. Hari ini masyarakat alergi pada pola tersebut, pemerintah dan rakyat sepakat agar pembangunan diadakan atas kesepakatan mereka berdua (sebagai institusi), dan ini berarti memberdayakan masyarakat. Dalam bahasa teknis disebut juga pembangunan yang berakar pada kehendak rakyat

Sedangkan menurut Raharjo Adisasmita (2006:35) lebih memfokuskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat pedesaan. “pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek.

1. Masukan atau input SDM, dana, peralatan/sarana, data rencana, dan teknologi.
2. Dari aspek proses (pelaksanaan, minitoring, dan pengawasan).
3. Dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran efektif, dan efisiensi).

### ***Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat***

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Sedangkan sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah :

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya ketertiban masyarakat dalam mengorganisasi diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.
2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
3. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

### ***Tujuan Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Ambar Teguh, (2004: 80-81) Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan

Demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

1. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal

### **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu cara dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka. Dalam penelitian ini memaparkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan di Kecamatan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara:
  - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  - b. Penanaman dan memupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
  - d. Dan menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Hasil Penelitian**

“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten kutai Kartanegara”

#### ***Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan***

Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan adalah dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan dan mengadakan rapat rutin setiap 1 bulan sekali bersama semua ketua RT. Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi sarana wadah masyarakat memberikan usulan-usulan serta masukan permasalahan yang di hadapi masyarakat, usulan-usulan itu bisa di terima dan di tangapi atau pun di pilih untuk mana masukan yang menjadi proritas bagi kepentingan masyarakat dilakukan oleh LPM secara baik.

Adapun beberapa usulan/aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Muara Jawa Ulu adalah tentang perbaikan jalan dan masalah masyarakat dan perusahaan, bantuan-bantuan dalam bentuk perbaikan rumah ibadah adapun aspirasi yang diterima Kelurahan Muara



Jawa Ulu sejauh ini tidak hanya usulan atau aspirasi yang berorientasi pada pembagunan fisik saja , ada juga masukan yang masuk ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mengarah pada pembagunan non fisik seperti Lamaran Kerja dari masyarakat untuk di sampaikan ke perusahaan

***Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia***

Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Ulu yaitu Lembaga Pemberdayaan masyarakat berupaya aktif mengajak seluruh warga Kelurahan Muara Jawa Ulu untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, ikut serta dalam kegiata-kegiata yang di lakukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat seperti gotong royong, berolah raga contohnya bermain futsal . dan himbauan-himbauan bahaya terorisme dan narkoba.. Adapun cara Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang pertama yaitu berkerja sama dengan kepolisian mengumpulkan RT dan warga masyarakat .Ada pun yang di undang adalah beberapa warga baik dari tokoh masyarakat, bertujuan melindungi warga dari ancaman teroris dan bahaya narkoba yang saat ini marak terjadi.

***Menumbuh Kembangkan Jiwa Dan Semangat Serta Memberdayakan Masyarakat Dalam Membangun Secara Berswadaya Dan Bergotong Royong***

Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara berswadaya dan bergotong royong yaitu LPM bersama dengan Kelurahan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada Serta melaksanakan perencanaan yang sudah disepakati bersama. Sehingga nantinya perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat dapat dicapai sesuai dengan target yang diinginkan.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Lembaga Pemberdayaan masyarakat dengan Kelurahan, maka perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga dapat terealisasi dengan baik pula, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Hanya saja banyak masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam hal kebersihan, seperti membuang Sampah sembarangan yang membuat parit/Selokan menjadi penuh dengan sampah yang dapat menyebabkan banjir. Untuk itu Lembaga Pemberdayaan masyarakat dan pihak Kelurahan perlu memberikan pengarahannya berupa bahwasanya membuang sampah itu dapat merugikan diri kita sendiri serta dapat pula merugikan orang lain, dan juga Lembaga Pemberdayaan masyarakat membuat plang-plang yang berisikan kata-kata yang mengingatkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Serta pihak Lembaga Pemberdayaan masyarakat mengingatkan kepada masyarakat agar dapat

menjaga kebersihan dan merawat fasilitas, sarana prasarana yang ada dikelurahan.

### ***Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup***

Dalam tugas dan fungsinya LPM lebih berperan sebagai pemberdaya bagi masyarakat agar masyarakat bisa menerima, mengelola memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan individu maupun kelompok dalam hal ini adalah masyarakat. Dan yang di maksud disini adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Terkait sumber daya yang di miliki tidak hanya untuk pendayagunaan dan pengembangan pembangunan fisik saja, namun juga terdapat pembangunan non fisik. LPM berkerja sama dengan Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitaran Kelurahan Muara Jawa Ulu untuk meningkatkan kualitas taraf hidupnya masyarakat dengan program-program pelatihan yang di harapkan di amini oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitaran/wilayah Kelurahan Muara Jawa Ulu. Dimana jumlah peserta atau masyarakat mengikuti pelatihan disesuaikan kriteria yang di sesuaikan perusahaan.

Ada pun kegiatan yang di lakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Jawa Ulu dalam Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, pesawat angkut dan pelatihan bengkel

### ***Faktor Pendukung***

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa faktor pendukung di antaranya :

1. Respon baik oleh Pemerintah dan masyarakat
2. Perusahaan yang berada di sekitaran Muara Jawa Ulu mendukung Kegiatan-kegiatan yang di lakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
3. Bahan materil dan nom materil bersumber dari bantuan pemerintan, swadaya masyarakat dan dari CSR Perusahaan

### ***Faktor Penghambat***

Faktor penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

1. Kurangnya komunikasi antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sehingga menimbulkan kurang solidnya kerjasama yang dilakukan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Ulu Lembaga Pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Khususnya di Kelurahan Muara Jawa Ulu dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan
  - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dimana LPM dengan terbuka dan senang hati menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan fisik dan non fisik dan di tanggapinya dengan cepat dan disampaikan ke Pemerintahan , LPM terkendali Oleh dana yang terbatas dan lambatnya respon pemerintah sehingga aspirasi diutamakan yang prioritas,
  - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, dari tugas dan fungsi PLM yaitu Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sudah cukup baik dilihat dari upaya LPM dalam hal keamanan lingkungan melalui kegiatan berkerja sama dengan kepolisi dan tokoh masyarakat dan RT-RT memberi binaan dan mengajak masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan aman bebas dari ancaman teroris dan narkoba biasanya itu terbawa dari lingkungan luar atau masyarakat pendatang dengan adanya kegiatan dari LPM diharapkan generasi muda dan lingkungan menjadi aman.
  - c. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam membangun secara swadaya dan gotong royong belum berjalan dengan maksimal, karena dalam melakukan kegiatannya gotong- royong tidak semua masyarakat di gerakan dan tersentuh oleh LPM
  - d. Menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam, serta Kelestarian lingkungan hidup yaitu meski perjalanan kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPM , tetapi masih kurang berjalan baik karena kurangnya sosialisasi yang diberikan LPM dan hanya di rasakan sebagian masyarakat.

### ***Saran***

1. Sebaiknya dalam melaksanakan Tugas dan fungsi LPM dalam mengkoordinasikan Perencanaan pembangunan uang bersumber dari masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan dari pihak swasta saja , namun mengerkan swadaya masyarakat agar permasalahan pembangunan dapat segera teratasi
2. Pihak LPM perlu lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kerjaa LPM ,seperti permasalahan pembangunan

3. Pihak LPM sebaiknya mensosialisasikan lebih luas lagi program kegiatan yang di lakukan LPM sehingga tidak ada masyarakat yang tidak marasa tidak tau program kegiatan LPM wilayah kerja LPM

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Univrsitas.Muhammadiyah Malang Press.
- Adisasmita, Raharjdo. 2006, *Pembangunan Pedesaan Perkotaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong, J. lexy, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suharto. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfa Beta.
- Sulistyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Jogjakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 *Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat*.
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 *Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa*.